



REKAM JEJAK PASLON, TIM KAMPANYE DAN PENDUKUNG

**Pada Pemilihan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Makassar 2020**

**FRAKSI RAKYAT SULAWESI SELATAN
FRAKSI RAKYAT SULAWESI SELATAN**

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Indonesia merupakan ajang bertemunya konflik kepentingan baik antara pengusaha maupun para pemodal. Dugaan adanya konflik kepentingan di balik kontestasi pilkada yang selama ini digelar, diindikasikan karena pendanaan partai politik dan kampanye pemilu memerlukan ongkos politik yang tidak murah. Penelitian yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA) mengungkap jika anggaran Pilkada pada tingkat Kabupaten/Kota berkisar antara Rp. 5.000.000.000 – Rp. 28.000.000.000.

Konsekuensi dari tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan dalam tiap pilkada mendorong terjadinya kontrak politik antara calon kepala daerah dengan berbagai lingkaran kepentingan pengusaha maupun pemodal. Olehnya itu, tidak jarang berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh para pejabat kepala daerah terpilih cenderung merusak lingkungan hidup dan menghilangkan sumber-sumber penghidupan masyarakat. Melalui pemberian kebijakan mengenai ijin-ijin usaha dalam mengelola sumber daya alam seringkali mengorbankan hak-hak masyarakat terdampak.

Pada tanggal 9 Desember 2020, 12 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan akan menggelar kontestasi pemilihan kepala daerah secara serentak. Dari ke 12 kabupaten dan kota tersebut, Kota Makassar menjadi wilayah kontestasi politik yang ramai diperbincangkan dan disoroti oleh mata publik. Hal ini dikarenakan Kota Makassar merupakan ibu kota Sulawesi Selatan dan juga menjadi hilir dari berbagai kepentingan di Sulawesi Selatan. Pada pilkada Kota Makassar tahun ini, terdapat empat pasangan calon yang akan berkontestasi yakni pasangan nomor urut satu Moh. Ramadhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi, nomor urut dua yakni Munafri Arifuddin dan Abd. Rahman Bando, pasangan nomor urut tiga yakni Syamsu Rizal MI dan Fadli Ananda, dan terakhir pasangan nomor urut ke empat Irman Yasin Limpo dan Muh. Zunnun Armin NH.

Berdasarkan dari uraian di atas, Fraksi Rakyat Sulawesi Selatan yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan, Jaringan Advokasi Tambang dan Lembaga Bantuan Hukum Makassar telah melakukan investigasi khusus terhadap empat pasangan calon yang akan berkontestasi guna membuka jejaring konflik kepentingan oligarki yang ada dalam kontestasi pilkada Kota Makassar tahun ini. Adapun empat hal yang diinvestigasi seputar pasangan-pasangan calon yang mengikuti pilkada Kota Makassar tahun ini yakni; (1) Rekam jejak pasangan calon; (2) Harta kekayaan pasangan

calon; (3) Penerimaan sumbangan dana kampanye pasangan calon; dan (4) Tim dan pendukung pasangan calon.

A. Rekam Jejak Paslon

1. Moh. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi

a. Moh. Ramdhan Pomanto

Akrab disapa Danny merupakan mantan walikota Makassar (petahana) periode 2014-2019. Pada kontestasi Pilkada maju kembali sebagai calon Walikota Makassar. Jika melihat rekam jejak selama menjabat, salah satu yang patut disoroti oleh para pegiat lingkungan hidup yakni pada lahirnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.

Kebijakan tersebut memberikan alokasi ruang reklamasi CPI dan proyek reklamasi seluas 4.000 ha. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun Walhi Sulsel (2018) akibat kebijakan RTRW berdampak pada beroperasinya tambang pasir laut yang daerah wilayah tangkap nelayan Galesong, Takalar. Tambang pasir laut membuat kerusakan di pesisir Galesong Raya (abrasi sepanjang 10 hingga 20 meter, 20 rumah hancur dan 2 pemakaman umum rusak berat), pengalihan profesi dari nelayan menjadi pekerja informal (tukang batu dan pemulung).

b. Fatmawati Rusdi

Merupakan suami dari Rusdi Masse, yang merupakan anggota DPR RI yang juga sebagai pengusaha. Fatmawati Rusdi juga merupakan pengusaha (Direktris PT Bayumas Jaya Mandiri Lines Jakarta dan mantan anggota DPR RI periode 2014-2018). Fatmawati Rusdi pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Sidrap pada tahun 2018 namun gagal terpilih.

2. Munafri Arifuddin dan Abd. Rahman Bando

a. Munafri Arifuddin

Appi, Munafri merupakan kontestan pada Pilkada serentak Walikota Makassar tahun 2018. Munafri menantu dari Aksa Mahmud (Pendiri Bosowa Group). Munafri yang saat itu berpasangan dengan Rachmatika Dewi melawan kotak kosong yang kemudian memberikan kemenangan bagi kotak kosong. Untuk Pilkada kali ini, Munafri kembali maju dengan berpasangan dengan Abd. Rahman Bando.

b. Abd. Rahman Bando

Rahman Bando merupakan seorang birokrat di Kota Makassar. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk maju sebagai calon Wakil Walikota Makassar. Ia merupakan adik dari Muslimin Bando, Bupati Enrekang 2013-2018 dan 2018-sekarang.

3. Syamsu Rizal MI dan Fadli Ananda

a. Syamsu Rizal MI

Deng Ical merupakan mantan Wakil Walikota Makassar pada periode 2014-2019 yang juga bersama Ramdhan Pomanto pada saat itu menggagas RTRW Kota Makassar. Pada Pilkada tahun ini, Deng Ical yang juga seorang pengusaha ini mencalonkan diri sebagai Walikota Makassar.

b. Fadli Ananda

Pilkada tahun ini merupakan perdana bagi Fadli dalam terjun dunia politik sebagai calon Wakil Walikota.

4. Irman Yasin Limpo dan Muh. Zunnun Armin NH

a. Irman merupakan seorang birokrat yang telah mengisi berbagai posisi di tingkat daerah hingga provinsi. Pilkada kali ini Irman maju sebagai calon Walikota Makassar dan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ia merupakan adik dari Syahrul Yasin Limpo yang menjadi Menteri Pertanian. Irman Yasin Limpo atau yang akrab dipanggil None ini tercatat memiliki pelanggaran Kode Etik ASN yang telah diputuskan terbukti oleh Komite Aparatur Sipil Negara (Alfarizi, 2020). Sebelumnya Bawaslu Makassar menemukan dugaan pelanggaran yakni pendekatan ke partai politik, mempromosikan dirinya sebagai calon kepala daerah, mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon (Adlan, 2020; Pasabuan, 2020).

b. Muh. Zunnun Armin NH

Zunnun merupakan seorang pengusaha dan juga mantan anggota DPRD Provinsi Sulsel. Pada Pilkada tahun ini ia mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota Makassar.

B. Harta Kekayaan Paslon

1. Moh. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi

a. Moh. Ramdhan Pomanto

Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) menyebutkan jumlah kekayaan Danny sebesar Rp. 197.522.838.457 (195,5 miliar). Harta yang dimiliki didominasi dengan kepemilikan tanah dan bangunan yang mencapai 42 dengan total nilai Rp. 156.957.834.000. Jumlah alat transportasi dan mesin yang dimiliki sebanyak 10 buah dengan total nilai Rp. 3.504.000.000

b. Fatmawati Rusdi

Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) menyebutkan jumlah kekayaan Fatma sebesar Rp. 62.946.559.087 (62,9 miliar). Harta yang dimiliki didominasi dengan kepemilikan tanah dan bangunan yang mencapai 22 dengan total nilai Rp. 54.701.600.000. Jumlah alat transportasi dan mesin yang dimiliki sebanyak 12 buah dengan total nilai Rp. 2.260.000.000.

2. Munafri Arifuddin dan Abd. Rahman Bando

a. Munafri Arifuddin

Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) menyebutkan jumlah kekayaan Appi sebesar Rp. 4.807.869.082 (4,8 miliar). Harta yang dimiliki didominasi dengan kepemilikan tanah dan bangunan yang mencapai 8 dengan total nilai Rp. 7.250.000.000. Jumlah harta kekayaan telah dikurangi total utang sebanyak 3.683.362.751.

b. Abd. Rahman Bando

Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) menyebutkan jumlah kekayaan Rahman Bando sebesar Rp. 39.478.148.898 (39,4 miliar). Harta yang dimiliki didominasi dengan kepemilikan tanah dan bangunan yang mencapai 41 dengan total nilai Rp. 36.104.505.000. Jumlah alat transportasi dan mesin yang dimiliki sebanyak 6 buah dengan total nilai Rp. 1.495.000.000.

3. Syamsu Rizal MI dan Fadli Ananda

a. Syamsu Rizal MI

Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) menyebutkan jumlah kekayaan Deng Ical sebesar Rp. 32.533.914.495 (32,5 miliar). Harta yang dimiliki didominasi dengan kepemilikan tanah dan bangunan yang mencapai 18 dengan total nilai Rp. 18.308.900.000. Jumlah alat transportasi dan mesin yang dimiliki sebanyak 25 buah dengan total nilai Rp. 7.120.000.000.

b. Fadli Ananda

Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) menyebutkan jumlah kekayaan Fadly sebesar Rp. 149.259.675.073 (149,2 miliar). Harta yang dimiliki didominasi dengan kepemilikan tanah dan bangunan yang mencapai 4 dengan total nilai Rp. 146.700.000. Jumlah alat transportasi dan mesin yang dimiliki sebanyak 1 buah dengan total nilai Rp. 550.000.000.

4. Irman Yasin Limpo dan Muh. Zunnun Armin NH

a. Irman Yasin Limpo

Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) menyebutkan jumlah kekayaan Irman sebesar Rp. 9.194.448.282 (9,1 miliar). Harta yang dimiliki didominasi dengan kepemilikan tanah dan bangunan yang mencapai 10 dengan total nilai Rp. 7.325.000.000.

b. Muh. Zunnun Armin NH

Pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (2020) menyebutkan jumlah kekayaan Fadly sebesar Rp. 5.445.000.000 (5,4 miliar). Harta yang dimiliki didominasi dengan kas dan setara kas sebesar Rp. 2.050.000.000. Kepemilikan tanah dan bangunan yang mencapai 1 dengan total nilai Rp. 1.000.000.000. Jumlah alat transportasi dan mesin yang dimiliki sebanyak 2 buah dengan total nilai Rp. 1.845.000.000.

C. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon

1. Moh. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi

Berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) KPU Kota Makassar (2020) menyebutkan untuk jumlah pasangan nomor urut 1 ini sebesar Rp. 200.000.000 yang bersumber dari sumbangan pasangan calon.

2. Munafri Arifuddin dan Abd. Rahman Bando

Berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) KPU Kota Makassar (2020) menyebutkan untuk jumlah pasangan nomor urut 2 ini sebesar Rp. 7.692.000.000 dengan perincian, sumbangan pasangan calon sebesar Rp. 2.040.000.000, sumbangan pihak lain perseorangan Rp. 75.000.000, sumbangan pihak lain Badan Hukum swasta Rp. 5.550.000.000 (uang) dan Rp. 27.000.000 (jasa).

3. Syamsu Rizal MI dan Fadli Ananda

Berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) KPU Kota Makassar (2020) menyebutkan untuk jumlah pasangan nomor urut 3 ini sebesar Rp. 674.909.500 dengan rincian, sumbangan pasangan calon Rp. 600.309.500 (uang) dan Rp. 74.600.000 (barang).

4. Irman Yasin Limpo dan Muh. Zunnun Armin NH

Berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) KPU Kota Makassar (2020) menyebutkan untuk jumlah pasangan nomor urut 4 ini sebesar Rp. 366.060.000 dengan rincian, sumbangan pasangan calon Rp. 7.500.000 (uang) dan Rp. 40.000.000 (jasa), sumbangan pihak lain perseorangan Rp. 110.000.000 (uang) dan Rp. 208.560.000 (barang).

D. Tim Kampanye dan Pendukung Paslon

1. Moh. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020, pasangan nomor urut 1 ini didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan total kursi sebanyak 11 kursi. Pasangan ini juga didukung oleh Partai Gelora dan Partai Bulan Bintang.

Berdasarkan berkas dari pasangan nomor urut 1 mengenai daftar nama tim kampanye dan penghubung paslon, terdapat 36 nama tim kampanye dan 3 penghubung. Selain itu terdapat nama-nama diluar daftar tersebut yang menjadi pendukung.

Hasil penelurusan tim riset mengenai profil para tim kampanye dan pendukung pasangan nomor 1 ini didominasi oleh para politisi partai pengusung serta pendukung dan anggota Dewan (DPR RI, DPRD Sulsel dan DPRD Makassar). Beberapa diantaranya juga berlatar belakang sebagai pengusaha. Berikut beberapa yang menjadi sorotan.

a. Andi Iwan Darmawan Anas (Ketua Tim Pemenangan)

Andi Iwan Darmawan Anas ditunjuk sebagai ketua tim pememangan pasangan nomor 1 ini. Andi Iwan merupakan ketua DPW Partai Gerindra Sulsel. Selain itu ia juga sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Sulawesi Selatan II. Andi Iwan juga merupakan seorang pengusaha dan memiliki jabatan sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulsel.

Data dari situs dpr.go.id menyebutkan bahwa ia merupakan Direktur Utama PT GIA Lestari (Rumah Sakit Bersalin GIA Lestari). Data dari daftar Riwayat hidup Bakal Calon Anggota DPR RI (2013) menyebutkan jika ia merupakan Direktur Utama PT. Wardana Artha Guna. Beberapa pemberitaan (Redaksi Ujungpandang Pos, 2020; Ruslan, 2019; Irfan, 2020) menyebutkan bahwa ia adalah pemilik dari PT Wardana Artha Guna.

Pada tahun 2010 PT Wardana Artha Guna diputuskan bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dengan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2010. Perusahaan tersebut terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Takalar DIPA Stimulus Fiskal TA 2009. Perusahaan tersebut diharuskan membayar denda secara tanggung renteng Bersama 2 terlapor lainnya sebesar Rp. 400.000.000.

b. Rusdi Masse Mappasessu

Rusdi Masse Mappasessu merupakan masuk tim kampanye. Ia merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan yang juga menjawab sebagai anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem daerah pemilihan Sulawesi Selatan III. Ia juga

merupakan mantan Bupati Sidrap periode 2008-2018 dan suami dari Fatmawati Rusdi yang maju sebagai calon Wakil Walikota. Selain sebagai politisi, ia adalah seorang pengusaha dengan mendirikan PT Bayumas Jaya Mandiri (Editor Rakyat, 2016; Sappewali, 2018; Simamora, 2012) yang bergerak di bidang ekspedisi. Saat ini ia dilaporkan oleh Kisman Latumakulita (Aji, 2020) ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan Gratifikasi untuk mengatur kuota impor buah. Laporan tersebut didasarkan atas hasil investigasi tempo.co.

c. Lainnya

Beberapa nama politisi yang juga merupakan pengusaha antara lain Edward Wijaya Horas yang merupakan anggota DPRD Sulsel dan juga merupakan pengusaha kuliner (Arfah, 2019), Erick Horas merupakan Wakil Ketua DPRD Makassar yang juga pengusahaan kuliner (Ronalyw, 2017), Rakhmat Kasjim merupakan anggota DPRD Sulsel yang juga memiliki usaha air kemasan dan sebagai Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana) Palopo (Redaksi Koran Seruya, 2018).

2. Munafri Arifuddin dan Abd. Rahman Bando

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020, pasangan nomor urut 2 ini didukung oleh Partai Demokrat, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan total kursi sebanyak 13 kursi. Pasangan ini juga didukung oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Berdasarkan berkas dari pasangan nomor urut 2 mengenai daftar nama tim kampanye dan penghubung paslon, terdapat 5 nama tim kampanye dan 2 penghubung. Selain itu terdapat nama-nama diluar daftar tersebut yang menjadi pendukung.

Hasil penelurusan tim riset mengenai profil para tim kampanye dan pendukung pasangan nomor 2 ini didominasi oleh para politisi partai pengusung serta pendukung dan anggota Dewan DPRD Makassar. Beberapa diantaranya juga berlatar belakang sebagai pengusaha. Berikut beberapa yang menjadi sorotan.

a. Erwin Aksa

Erwin Aksa merupakan seorang pengusaha sekaligus petinggi partai Golkar. Ia adalah Komisaris Utama Bosowa Grup dan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 tahun 2020, ia termasuk dalam Satuan Tugas Omnibus Law Bersama 127 anggota. Seperti yang diketahui bahwa berbagai organisasi, akademisi, hingga individu menolak Omnibus Law ini mulai dari perencanaan, proses pembuatan hingga disahkannya menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hingga hari ini penolakan terhadap kebijakan ini masih terus berlangsung.

Seperti yang kita ketahui Bosowa Group memiliki beberapa anak perusahaan diantaranya PT Bosowa Energi dan Bosowa Semen. Bosowa Energi membangun PLTU Punagaya yang diduga (Syarief, 2019) limbah pembuangannya mencemari lingkungan membuat kekeruhan dan salitasi pada sumur warga. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Tetty, Baso dan Syamsuddin (2014) yang menunjukkan terjadi penurunan pendapatan yang cukup signifikan antara petani rumput laut yang lahannya jauh dari pembuangan limbah air panas PLTU Punagaya dengan lahan budidaya yang jaraknya dekat dengan saluran pembuangan air. Limbah tersebut mengakibatkan penurunan jumlah produksi rumput laut yang menyebabkan kerugian bagi petani.

Selanjutnya yakni Bosowa Semen yang memiliki Pabrik semen di Maros. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun Walhi Sulawesi Selatan (2018) Pabrik Semen Bosowa memiliki konsesi tambang paling luas di kawasan karst Maros. Hasil laporan dari Rusdianto (2019) mengungkap jika pabrik Semen Bosowa mengakibatkan pencemaran lingkungan yakni berupa debu yang berdampak pada gangguan pernapasan penduduk yang tinggal di sekitar pabrik. Masih dalam laporan tersebut, temuan dari Ulfa Utami Mappe mengungkap jika terjadi krisis air dan saat musim hujan terjadi banjir. Kemudian terjadi ketimpangan rumah tidak layak huni di sekitar area pabrik.

b. Solihin Kalla

Solihin Kalla menjadi salah satu pendukung dari pasangan nomor urut 2. Meskipun tidak termasuk dalam tim kampanye yang terdapat dalam berkas yang di serahkan ke KPU Kota Makassar, namun dalam beberapa pemberitaan ia terlibat aktif dalam mendukung pasangan nomor urut 2 ini (Mirsan, 2020; Sabri, 2020; Editor Pedoman Rakyat, 2020; Kambie, 2020) disebutkan sebagai wakil ketua tim kemenangan (Mirsan, 2020).

Solihin Kalla merupakan pengusaha dan berperan sebagai Presiden Direktur Kalla Group. Salah satu anak perusahaan yakni PT Bumi Mineral Sulawesi. Perusahaan tersebut mendirikan Pabrik Smelter di Luwu Timur. Namun pembangunan Smelter dan Pelabuhan sebagai jalur keluar masuk bahan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Pembangunan pelabuhan dilakukan sedangkan belum memiliki izin (Husain, 2019; Redaksi Tekape, 2019).

Selain itu pembangunan pelabuhan juga berdampak pada kerusakan ekosistem laut (Husain, 2019) karena pembangunan pelabuhan melintasi kawasan hutan Mangrove yang masuk kategori hutan lindung. Pembangunan pabrik smelter juga merusak ekosistem laut di Desa Karang-karangan (Redaktur Tekape, 2019). Pembangunan jaringan transmisi PT BMS juga diduga melanggar penggunaan Kawasan Hutan Lindung (Redaksi Koran Seruya, 2019). Ketua Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL), Ismail Ishak mengungkap jika PT BMS belum memiliki izin menggunakan kawasan hutan dari telah melakukan aktivitas (Redaksi Koran Seruya, 2019).

c. Lainnya

Salah satu tim kampanye yakni Ruslan Mahmud, yang merupakan Ketua DPD Perindo Makassar yang juga berprofesi sebagai pengusaha di PT Mega Nusantara Raya (Zulfikarnain, 2017; Intenesty, 2020; Paembonan, 2017) yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang.

3. Syamsu Rizal MI dan Fadli Ananda

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020, pasangan nomor urut 3 ini didukung oleh Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan total kursi sebanyak 10 kursi.

Berdasarkan berkas dari pasangan nomor urut 3 mengenai daftar nama tim kampanye dan penghubung paslon, terdapat 13 nama tim kampanye dan 2 penghubung. Selain itu terdapat nama-nama diluar daftar tersebut yang menjadi pendukung.

Hasil penelurusan tim riset mengenai profil para tim kampanye dan pendukung pasangan nomor 3 ini didominasi oleh para politisi partai pengusung serta pendukung dan anggota DPRD Makassar). Beberapa diantaranya juga berlatar belakang sebagai pengusaha. Berikut beberapa yang menjadi sorotan.

a. Fathul Fauzi Nurdin

Fathul Fauzi Nurdin merupakan anak dari Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Beberapa pemberitaan mengungkap jika ia menjadi pendukung pasangan nomor urut 3 (Rasyad, 2020; Nurjannah, 2020; Suriadi, 2020). Fathul juga merupakan Ketua Banteng Muda Indonesia Sulawesi Selatan yang merupakan organisasi sayap PDIP.

Pada temuan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia (KSLI, 2020) menyebutkan Fathul memiliki kedekatan dengan Akbar Nugraha yang merupakan teman seangkatan di Binus University. Selain itu Fathul juga menjadi penghubung bagi Abil Iksan. Akbar Nugraha merupakan Direktur di PT. Banteng Laut Indonesia serta Abil Iksan yang menjabat sebagai Direktur di PT. Banteng Laut Indonesia dan PT. Nugraha Indonesia Timur dimana kedua perusahaan tersebut memiliki ijin konsesi tambang pasir laut. Lokasi ruang tambang pasir laut merupakan wilayah tangkap nelayan masyarakat pulau Kodingareng. Perlu diketahui bahwa adanya tambang pasir laut mengakibatkan berbagai dampak buruk sosial, ekonomi, hingga psikologis terhadap masyarakat Kodingareng.

b. Ilham Arif Sirajuddin

Ilham Arif Sirajuddin merupakan salah satu pendukung dari pasangan nomor urut 3. Aktivitas dukungannya telah terlihat sejak awal Syamsu Rizal MI dan Fadli Ananda dipasangkan (Mirsan, 2020; Syam, 2020; Tim SINDOnews, 2020).

IAS, sapaan akrabnya merupakan Walikota Makassar dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014. IAS juga pernah terjerat kasus tindak pidana korupsi. Melalui Putusan Pengadilan Negeri No: 123/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST dengan putusan pidana 4 tahun penjara. Penyalahgunaan wewenang dilakukan dalam proses Kerjasama rehabilitasi, operasi, dan transfer Instalasi Pengolahan Air II Panaikang Tahun 2007-2013 antara PT Traya dengan PDAM Kota Makassar (Movanita, 2015). Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 45.844.159.843.

c. Lainnya

Beberapa tim kampanye dan pendukung yakni A. Yagkin Padjalangi sebagai ketua tim pemenangan. Yagkin merupakan Kabid Ekonomi Kreatif PDIP Sulsel.

Ia juga merupakan pengusaha dibidang kuliner yakni memiliki Warkop Cappo (Purnama & Idris, 2017; Kita, 2020).

Selain itu terdapat nama Andi Suhada Sappaile yang merupakan Wakil Ketua DPRD Makassar Fraksi PDIP. Ia juga merupakan istri dari Erwin Hatta S yang merupakan pengusaha hotel (Mahyuddin, 2014) yakni pemilik Hotel Asyira.

Fauzi Andi Wawo merupakan anggota DPRD Sulsel Fraksi PKB. Fauzi juga dikenal sebagai seorang pengusaha di bidang event organizer yakni sebagai Direktur PT Slamersindo Makassar dan Direktur CV Macinnonk (Arfah, 2019).

4. Irman Yasin Limpo dan Muh. Zunnun Armin NH

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020, pasangan nomor urut 4 ini didukung oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan total kursi sebanyak 15 kursi. Selain itu pasangan ini didukung oleh Partai Berkarya dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Berdasarkan berkas dari pasangan nomor urut 4 mengenai daftar nama tim kampanye dan penghubung paslon, terdapat 3 nama tim kampanye dan 3 penghubung. Selain itu terdapat nama-nama diluar daftar tersebut yang menjadi pendukung.

Hasil penelurusan tim riset mengenai profil para tim kampanye dan pendukung pasangan nomor 3 ini didominasi oleh para politisi partai pengusung serta pendukung dan anggota Dewan (DPRD Sulsel dan DPRD Makassar). Beberapa diantaranya juga berlatar belakang sebagai pengusaha. Berikut beberapa yang menjadi sorotan.

a. Nurdin Halid

Nurdin Halid punya sejarah panjang dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Ia merupakan Wakil Ketua Umum DPP Golkar. Nurdin Halid adalah ayah dari Zunnun yang maju sebagai calon Wakil Walikota Makassar. Selain itu iya merupakan seorang pengusaha tambak melalui PT. Agro Nusantara Halid (Azis, 2018).

Nurdin Halid juga pernah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung pada tahun 2007 atas kasus korupsi minyak goreng Bulog saat ia menjabat sebagai Ketua Umum Koperasi Distribusi Indonesia (KDI). Total kerugian negara mencapai Rp. 169,7 miliar yang akhirnya divonis 2 tahun penjara dan denda Rp. 30.000.000 (Tempo, 2007).

b. Lainnya

Andi Patabai Pakobori merupakan Ketua Tim Pemenangan. Ia merupakan Ketua DPW Partai Berkarya Sulsel dan juga seorang mantan Bupati Bulukumba (1995-2005).

Demikian pemaparan hasil tim riset Fraksi Rakyat Sulawesi Selatan mengenai Rekam Jejak Paslon, Tim Kampanye dan Pendukung Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020. Data ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemilih yang akan menentukan pilihannya pada 9 Desember 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. R. (2020). *Kader Nasdem Laporkan Ahmad Ali dan Rusdi Masse ke KPK*. <https://nasional.tempo.co/read/1405095/kader-nasdem-laporkan-ahmad-ali-dan-rusdi-masse-ke-kpk/full&view=ok> (Diakses 15 November 2020)
- Adlan, M. (2020). *Bawaslu Makassar: None Diduga Melanggar Kode Etik ASN*. <https://sulselekspres.com/bawaslu-makassar-none-diduga-melanggar-kode-etik-asn/> (Diakses 16 November 2020)
- Arah, K. (2020). *Yagkin Padjalangi Resmikan Warkop Cappo Cabang Jl. Korban 40.000 Jiwa*. <https://matakota.co/2020/01/17/yagkin-padjalangi-resmikan-warkop-cappo-cabang-jl-korban-40-000-jiwa/> (Diakses 17 November 2020)
- Arfah, M. H. (2019). *Tribunwiki: 'Oppo' di DPRD Sulsel, Ini Data Diri Edward Horas*. <https://makassar.tribunnews.com/2019/06/02/tribunwiki-oppo-di-dprd-sulsel-ini-data-diri-edward-horas> (Diakses 15 November 2020)
- Arfah, M. H. (2019). *Tribunwiki: Fauzi Andi Wawo Jadi Legislator DPRD Sulsel, Punya Pengalaman panjang di Event Organizer*. <https://makassar.tribunnews.com/2019/06/03/tribunwiki-fauzi-andi-wawo-jadi-legislator-dprd-sulsel-punya-pengalaman-panjang-di-event-organizer> (Diakses 17 November 2020)
- Azis, A. *Ini Alasan Tokoh Masyarakat Anggap NH Tak Terpisahkan dengan Bontobahari Bulukumba*. <https://makassar.tribunnews.com/2018/04/27/ini-alasan-tokoh-masyarakat-anggap-nh-tak-terpisahkan-dengan-bontobahari-bulukumba> (Diakses 17 November 2020)
- Editor. (2020). *Keluarga Besar Kalla Group Bersatu Dukung Appi-Rahman*. <https://pedomanrakyat.com/keluarga-besar-kalla-group-bersatu-dukung-appi-rahman/> (Diakses 16 November 2020)
- Editor Rakyat. (2016). *Bos Nasdem Sulsel Itu Dulu Cuma Juru Parkir*. <https://rakyatsulsel.co/2016/08/26/bos-nasdem-sulsel-itu-dulu-cuma-juru-parkir/> (Diakses 15 November 2020)
- Husain, A. (2019). *Belum Kantongi Izin, PT BMS Bangun Pelabuhan di Luwu*. <https://ritmee.co.id/belum-kantongi-izin-pt-bms-bangun-pelabuhan-di-luwu/> (Diakses 16 November 2020)
- Intenisty. (2020). *Melirik Peluang Bisnis Jasa Pengiriman Barang serta Bagaimana Cara Memulainya*. <https://mediaini.com/melirik-peluang-bisnis-jasa-pengiriman-barang-serta-bagaimana-cara-memulainya/> (Diakses 16 November 2020)
- Irfan. (2020). *Andi Iwan Darmawan Aras Terpilih Ketua Kadin Sulsel*. <https://barrupos.com/andi-iwan-darmawan-aras-terpilih-ketua-kadin-sulsel/> (diakses 15 November 2020)
- Kambie, AS. (2020). *Kalla Group Satu Komando di Pilwali Makassar 2020, Solihin Kalla: Harap Semua Ikut Pilihan Saya*. <https://makassar.tribunnews.com/2020/08/29/kalla-group-satu-komando-di-pilwali-makassar-2020-solihin-kalla-harap-semua-ikut-pilihan-saya> (Diakses 16 November 2020)

- KSLI. (2020). *Kolega Gubernur Nurdin Abdullah di Balik Tambang Pasir an Reklamasi MNP di Sulawesi Selatan*. <https://www.jatam.org/kolega-gubernur-nurdin-abdullah-di-balik-tambang-pasir-dan-reklamasi-mnp-di-sulawesi-selatan/> (Diakses 17 November 2020)
- Mahyuddin. (2014). *Aklamasi Ketua PP Makassar, Erwin Syukuran di Kafe*. <https://makassar.tribunnews.com/2014/11/03/aklamasi-ketua-pp-makassar-erwin-syukuran-di-kafe> (Diakses 17 November 2020)
- Mirsan, A. (2020). *Blak-blakan, IAS Ungkap Alasan Dukung Dilan di Pilwalkot Makassar*. <https://fajar.co.id/2020/07/15/blak-blakan-ias-ungkap-alasan-dukung-dilan-di-pilwalkot-makassar/> (Diakses 17 November 2020)
- Mirsan, A. (2020). *Relawan Kalla Dikukuhkan, Solihin Kalla: kalau Mau Makassar bangkit, Pilih Appi-Rahman*. <https://fajar.co.id/2020/09/11/relawan-kalla-dikukuhkan-solihin-kalla-kalau-mau-makassar-bangkit-pilih-appi-rahman/> (Diakses 16 November 2020)
- Mirsan, A. (2020). *Solihin Kalla: Appi-Rahman bakal Gencarkan Kampanye 'Udara' dan Penyuluhan Kesehatan*. <https://fajar.co.id/2020/09/24/solihin-kalla-appi-rahman-bakal-gencarkan-kampanye-udara-dan-penyuluhan-kesehatan/> (Diakses 16 November 2020)
- Movanita, A. N. K. (2015). Kasus PDAM Makassar, Eks Wali Kota Didakwa Rugikan Negara Rp. 45,8 Miliar. <https://nasional.kompas.com/read/2015/10/19/20103271/Kasus.PDAM.Makassar.Eks.Wali.Kota.Didakwa.Rugikan.Negara.Rp.45.8.Miliar?page=all> (Diakses 17 November 2020)
- Nurjannah. (2020). *Putra Gubernur Sulsel Dampingi Dilan Daftar di KPU*. <https://layar.news/putra-gubernur-sulsel-dampingi-dilan-daftar-di-kpu/> (Diakses 17 November 2020)
- Paembonan, A. (2017). *Ruslan Mahmud: Jejak Anak Rantau Jadi Pejuang Aspirasi*. <https://sulselekpres.com/ruslan-mahmud-jejak-anak-rantau-jadi-pejuang-aspirasi/4/> (Diakses 16 November 2020)
- Pasabuan, I. (2020). *Bawaslu Makassar Agendakan Pemanggilan None?*. <http://makassartoday.com/2020/01/15/bawaslu-makassar-agendakan-pemanggilan-none/> (Diakses 16 November 2020)
- Purnama, A. N., & Idris, I. (2017). *Mariki' Ngopi I Warkop Cappo*. <https://gosulsel.com/2017/01/13/mariki-cappo-ngopi-di-warkop-cappo/> (Diakses 17 November 2020)
- Rasyad, T. (2020). *Putra Bungsu Gubernur Sulsel Kagumi DILAN: Pemimpin yang Murni Lahir dari Rakyat*. <https://berita.news/2020/09/05/putra-bungsu-gubernur-sulsel-kagumi-dilan-pemimpin-yang-murni-lahir-dari-rakyat/> (Diakses 17 November 2020)
- Redaksi. (2020). *Maestro Konstruksi yang Berkiprah di Senayan*. <https://ujungpandangpos.com/maestro-konstruksi-yang-berkiprah-di-senayan/> (Diakses 15 November 2020)

- Redaksi. (2019). *Diduga PT BMS Bangun Pelabuhan Tanpa Kantongi Izin*. <https://tekape.co/diduga-pt-bms-bangun-pelabuhan-tanpa-kantongi-izin/> (Diakses 16 November 2020)
- Redaksi. (2018). *Rakhmat Kasjim, Sukses di Dunia Usaha, Kini Siap Perjuangkan Masyarakat*. <https://koranseruya.com/rakhmat-kasjim-sukses-di-dunia-usaha-kini-siap-perjuangkan-masyarakat.html> (Diakses 15 November 2020).
- Redaktur. (2020). *Setelah Ijin Usaha, PT BMS Kembali Disorot Soal Penggunaan Kawasan Hutan*. <https://koranseruya.com/setelah-ijin-usaha-pt-bms-kembali-disorot-soal-penggunaan-lahan-hutan.html> (Diakses 16 November 2020)
- Redaktur. (2019). *Warga Dari 2 Desa di Luwu Timur Bakar Ban di Pintu Masuk PT BMS*. <https://tekape.co/warga-dari-2-desa-di-luwu-bakar-ban-di-pintu-masuk-pt-bms/> (diakses 16 November 2020)
- Ronalyw. (2017). *Miliki Lima Rumah Makan, Juga Buka Usaha Café*. <https://beritakotamakassar.com/berita/2017/09/14/miliki-lima-rumah-makan-buka-usaha-kafe/> (Diakses 15 November 2020)
- Ruslan. (2019). *Wawancara Khusus Andi Iwan Aras: Pernah 'Berdarah-darah' Besarkan Gerindra*. <https://lontar.id/wawancara-khusus-andi-iwan-aras-pernah-berdarah-darah-besarkan-gerindra/> (Diakses 15 November 2020)
- Sabri. (2020). *Jusuf Kalla: Appi Penerus Saya di Makassar*. <https://rakyat.news/read/2020/11/12/29123/jusuf-kalla-appi-penerus-saya-di-makassar/> (Diakses 16 November 2020)
- Sappewali, A. (2018). *Pernah Jadi Buruh Tanjung Priok, ini Cerita di Balik Perjuangan Rusdi Masse ke Senayan*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20120826/78/92538/saudagar-bugis-rusdi-masse-dari-sopir-jadi-juragan-kapal> (Diakses 15 November 2020)
- Simamora, N. S. (2012). *Saudagar Bugis: Rusdi Masse, dari Sopir Jadi Juragan Kapal*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20120826/78/92538/saudagar-bugis-rusdi-masse-dari-sopir-jadi-juragan-kapal> (diakses 15 November 2020)
- Suriadi. (2020). *Anak Nurdin Abdullah Siap Menangkan DILAN di Makassar*. <https://trotoar.id/2020/09/15/anak-nurdin-abdullah-siap-menangkan-dilan-di-makassar/> (Diakses 17 November 2020)
- Syam, A. (2020). *IAS: Dukungan Masyarakat Kian Besar, Jangan Melemah karena Survei Opini*. <https://bukamatanews.id/read/2020/10/13/ias-dukungan-masyarakat-kian-besar-jangan-melemah-karena-survei-opini> (Diakses 17 November 2020)
- Tempo. (2007). *Mahkamah Agung Hukum Nurdin Halid Dua Tahun Penjara*. <https://nasional.tempo.co/read/107594/mahkamah-agung-hukum-nurdin-halid-dua-tahun-penjara> (Diakses 17 November 2020)
- Tetty, Baso, A., & Syamsuddin, R. (2014). *Dampak Sosial Ekonomi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Punagaya Terhadap Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Jeneponto*. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
- Tim SINDOnews. *Diterpa Hoaks, IAS Tegaskan Dukungannya Takkan Berpindah dari Dilan*. <https://makassar.sindonews.com/read/207916/710/diterpa-hoaks-ias>

tegaskan-dukungannya-takkan-berpindah-dari-dilan-1603602615 (Diakses 17 November 2020)

Walhi Sulsel. (2018). *Catatan Akhir Tahun: Sulawesi Selatan 2018: Degradasi Lingkungan dan Pengaplingan Ruang Hidup Rakyat Terus Meningkat, Keselamatan Rakyat Terancam*. Makassar: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan.

Zulfikarnain. (2017). *Inspirasi Bisnis: Sukses Usaha Ekspedisi Beromzet Ratusan Juta Rupiah*. <https://economy.okezone.com/read/2017/07/02/320/1726840/inspirasi-bisnis-sukses-usaha-ekspedisi-beromzet-ratusan-juta-rupiah> (Diakses 16 November 2020)

Dokumen

Dokumen Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Perkara Nomor 04/KPPU-L/2010.

Dokumen Keputusan Komisi Pemilihan (KPU) Kota Makassar tentang Penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020. Nomor: 345/PL.02.2-Kpt/7371/KPU-Kot/IX/2020

Dokumen Komisi Pemilihan Umum Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR tahun 2013.

Dokumen Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar tentang Hasil Penerimaan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020. Nomor: 1672/PL.02.5-Pu/7371/KPU-Kot/XI/2020.

Dokumen Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Penyelenggaraan Negara untuk Mohammad Ramdhan Pomanto.

Dokumen Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Penyelenggaraan Negara untuk Fatmawati Rusdi.

Dokumen Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Penyelenggaraan Negara untuk Munafri Arifuddin.

Dokumen Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Penyelenggaraan Negara untuk Abd. Rahman Bando.

Dokumen Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Penyelenggaraan Negara untuk Syamsu Rizal MI.

Dokumen Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Penyelenggaraan Negara untuk Fadli Ananda.

Dokumen Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Penyelenggaraan Negara untuk Irman Yasin Limpo.

Dokumen Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Penyelenggaraan Negara untuk Andi Muh Zunnun Armin Nurdin Halid.